

Tata Kelola Ruang Hijau Metropolitan Jakarta Pasca Pindah Ibu kota: “Menuju Kota Global Hijau”

Bani Pamungkas^a

^aUniversitas Bakrie

e-mail : ^a bani.pamungkas@bakrie.ac.id

Abstrak

Jakarta, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia, menghadapi tantangan kompleks dalam memenuhi kebutuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) seiring dengan pesatnya urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan status Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara menjadi daerah khusus menawarkan peluang sekaligus ancaman bagi pengelolaan RTH yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menawarkan kerangka konseptual dalam mendorong transformasi tata kelola RTH di Jakarta pasca pemindahan ibu kota. Dengan menggabungkan studi literatur dan analisis kebijakan, artikel ini mengulas praktik tata kelola RTH di kota global lainnya dan menganalisis kerangka kebijakan nasional serta daerah terkait RTH di Jakarta. Hasil dari sintesis ini menawarkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh dinamika politik terhadap transformasi tata kelola ruang hijau di perkotaan, khususnya dalam konteks Jakarta yang menghadapi perubahan statusnya sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan utama dan strategi adaptif yang dapat diterapkan untuk memastikan keberlanjutan serta integrasi RTH dalam perencanaan kota yang semakin kompleks.

Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau (RTH); Tata Kelola; Daerah Khusus Jakarta; Keberlanjutan

Green Space Governance in Post-Capital Metropolitan Jakarta: Towards a Global Green City

Abstract

Jakarta, one of the world's largest metropolitan cities, faces significant challenges in meeting the demand for urban green spaces amid rapid urbanization and economic growth. The transition of Jakarta from a capital city to a special region introduces both opportunities and risks for managing urban green spaces (UGS) sustainably and inclusively. This study aims to develop and propose a conceptual framework to guide the transformation of UGS governance in Jakarta following the capital's relocation. By integrating literature review and policy analysis, this article evaluates UGS governance practices in other global cities and assesses national and regional policies related to UGS in Jakarta. The findings offer a deeper understanding of how political dynamics influence the transformation of urban green space governance, particularly given Jakarta's new role as a National Economic Center and Global City. To ensure the sustainability and effective integration of UGS in increasingly complex urban planning, the study also identifies key challenges and adaptive strategies.

Keywords: Urban Green Spaces (UGS); Governance; Jakarta post-capital; Sustainability.

A. PENDAHULUAN

Kota menjadi ruang hidup utama bagi sebagian besar penduduk global. Tantangan multi dimensi yang dihadapi kota secara global, membutuhkan tata kelola kebijakan yang tepat

dan terpadu dalam menjadikan kota yang layak huni dan berkelanjutan (Anguelovski, Connolly, & Brand, 2018; Nero, Callo-Concha, Anning, & Denich, 2017). Dimana kota diharapkan dapat menyediakan kualitas hidup

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

yang lebih baik untuk menjadi tempat bermukim dengan ketersediaan infrastruktur yang baik, lingkungan yang bersih, akses layanan publik yang mudah dan memadai, serta mendukung bagi terciptanya kesejahteraan fisik, mental dan sosial dari warganya.

Salah satu infrastruktur yang dibutuhkan memenuhi kota keberlanjutan ini ialah keberadaan ruang terbuka hijau. Dimana RTH merupakan bagian dari solusi berbasis alam (*nature-based solutions/NBS*) yang dapat membantu kota mengatasi tantangan lingkungan dan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup (Essuman-Quainoo & Jim, 2023; Nassary, Msomba, Masele, Ndaki, & Kahangwa, 2022; Scheuer, Davies, & Roitsch, 2024; Torres et al., 2023). Dalam konteks tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), RTH turut berkontribusi bagi pencapaian tujuan komitmen global tersebut, seperti pada SDG 3 (kesehatan sehat dan sejahtera), SDG 11 (kota dan pemukiman yang berkelanjutan), SDG 13 (penanganan Perubahan Iklim), dan SDG 15 (ekosistem darat).

RTH dalam bentuk taman, kebun, dan hutan kota ini, memiliki 5 benefit bagi kota dan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. *Pertama* dalam mengurangi efek pulau panas perkotaan, RTH membantu menurunkan suhu lingkungan dengan menyediakan vegetasi yang dapat menyerap panas dan meningkatkan kelembapan udara (Hanson, Eckberg, Widenberg, & Alkan Olsson, 2021). Ini mengurangi efek pulau panas yang sering terjadi di kawasan urban yang padat. *Kedua*, menangani polusi udara, dimana vegetasi RTH dapat menyerap polutan udara, seperti partikulat dan gas berbahaya, serta meningkatkan kualitas udara. Ini berkontribusi pada lingkungan yang lebih sehat bagi penduduk kota (Bille, Jensen, & Buitenwerf, 2023). *Ketiga* meningkatkan resiliensi terhadap perubahan iklim, bahwa RTH berfungsi sebagai penyangga alami terhadap bencana alam, seperti banjir, dengan meningkatkan penyerapan air hujan dan mengurangi risiko banjir (Nero et al., 2017). *Keempat*, meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan, dimana RTH menawarkan

ruang untuk rekreasi, interaksi sosial, dan aktivitas fisik, yang penting untuk kesehatan mental dan fisik penduduk (Zhao et al., 2024). Selain itu, RTH juga berfungsi sebagai ruang inklusif yang mendukung integrasi sosial dan meningkatkan kualitas hidup (Anguelovski et al., 2018). Dan *kelima*, mendukung keanekaragaman hayati, dimana RTH menyediakan habitat bagi flora dan fauna kota, meningkatkan keanekaragaman hayati dan mendukung ekosistem kota yang sehat (Chen et al., 2023).

Meski benefitnya diyakini penting, pengalaman berbagai kota global dalam memenuhi kebutuhan RTH menyiratkan sebagai upaya yang tidak mudah untuk di capai (Huang et al., 2023). Penyediaan dan pengelolaannya harus berhadapan dengan arus urbanisasi yang tinggi dan pembangunan ekonomi yang bergerak demikian cepat (Nassary et al., 2022). Sejumlah riset sebelumnya mencermati pentingnya kebijakan tata kelola RTH yang lebih adaptif dan strategis, yang tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat (van der Jagt et al., 2016). Namun demikian riset-riset tersebut belum banyak mengulas bagaimana pengaruh dinamika perubahan politik terhadap transformasi tata kelola ruang hijau di perkotaan, khususnya yang terjadi di dunia berkembang.

Jakarta, sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di dunia, menghadapi tantangan yang demikian kompleks dalam pengelolaan RTH. Tingkat urbanisasi yang demikian pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang bergerak cepat telah membuat kota ini tidak dapat memenuhi capaian pemenuhan RTH sebagaimana yang dimandatkan pada Rencana Tata Ruang yang disusunnya.

Saat ini, Jakarta tengah berada pada fase transisi pasca perubahan status dari ibu kota negara menjadi wilayah khusus (Hudalah, 2023; Kalalinggi, Hisdar, Sarmiasih, & Wijaya, 2023; Rifaid, Rachman, Baharuddin, & Gohwong, 2023). Pemindahan ibu kota ke Nusantara membuka peluang baru bagi Jakarta untuk memperkuat kebijakan tata kelola RTH yang berkelanjutan dan inklusif. Disisi lain

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

status khusus yang baru disandanginya sebagai provinsi yang berkedudukan sebagai Pusat Perekonomian Nasional dan Kota Global bisa menjadi ancaman “baru” bagi upaya penyediaan RTH yang dibutuhkan warga Jakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menawarkan kerangka konseptual dalam mendorong transformasi tata kelola RTH Jakarta pasca pemindahan ibu kota. Dengan mengkombinasikan elaborasi literatur, studi kebijakan serta praktik baik di kota global lainnya, studi ini diharapkan dapat mensintesis dan menawarkan kerangka konseptual dalam memahami determinasi politik dalam membuka ruang transformasi tata kelola ruang hijau di perkotaan, menggunakan kasus Jakarta pasca pemindahan ibukota negara.

B. METODE

Kerangka konseptual yang disusun dalam artikel ini dihasilkan dari elaborasi 2 elemen utama (Duff & Dubery, 2023; Goel, Sherry, & Sherry, 2012; Jaakkola, 2020; Johannessen & Olsen, 2023; Li, Chaulagain, & Yost, 2023; Rahman, Yaacob, & Radzi, 2016; Reese, 2023; Schreiber & Cramer, 2022). *Pertama* studi literatur, dengan mengelaborasi berbagai referensi ilmiah terkini terkait tata kelola RTH.

Termasuk praktik baik di negara lain. *Kedua* kerangka kebijakan/dasar pengaturan, dengan memetakan dan mengulas kebijakan di level nasional daerah terkait RTH dan daerah khusus Jakarta. Kedua elemen tersebut kemudian disintesis untuk menghasilkan narasi konsep yang mendasari gagasan transformasi pengelolaan ruang hijau di Metropolitan Jakarta dengan statusnya yang baru setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.

C. PEMBAHASAN

C.1. Jakarta Baru: Menjadi Kota Global Hijau

Di tengah upaya Metropolitan Jakarta menyelesaikan berbagai tantangan yang di hadapi, keputusan politik pemerintah bersama

DPR melalui UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara telah memberi arah kebijakan baru bagi Jakarta dengan memberikan kekhususan baru yang selanjutnya diatur dalam Undang-Undang tersendiri. Pasal 41 ayat (1), (2), (3), dan (4) UU No. 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara menjadi dasar perubahan status sekaligus mandat politik bagi Jakarta untuk mendapatkan kekhususan yang baru. Presiden Joko Widodo pun memberikan sinyal bahwa Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan dikembangkan menjadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global.

Pada rapat paripurna DPR RI ke-14 masa persidangan IV tahun sidang 2023-2024, DPR kmengesahkan RUU Daerah Khusus Jakarta, yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.2/2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. UU yang terdiri dari 73 pasal, 12 Bab ini menjadi dasar pemberian status dan kekhususan baru bagi Jakarta sebagai daerah dengan tambahan kewenangan sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global dengan fungsi yang diembannya sebagai pusat perdagangan, pusat kegiatan layanan jasa dan layanan jasa keuangan, serta pusat kegiatan bisnis nasional, regional, dan global.

Konsepsi kota global berawal dari pemikiran Sassen (1991) dalam menggambarkan kota-kota di negara maju seperti London, New York, Paris, Seoul, dan Tokyo (Sassen, 2008). Istilah ini dilekatkan pada kota yang berkembang sebagai pusat keuangan dan ekonomi global dengan kantor pusat perusahaan multinasional, yang memungkinkan kota-kota ini menjadi pusat utama layanan produsen lanjutan dan kegiatan ekonomi lainnya untuk mengendalikan dan mengarahkan ekonomi dunia (Pennisi, 2012). Ekonomi kota-kota global dibangun di atas sumber daya ekonomi tradisional (seperti lahan, tenaga kerja, teknologi, dan modal) serta imajinasi budaya/kreatif (seperti ekonomi kreatif).

Perkembangan kota global kecenderungannya memberikan tekanan signifikan luasan RTH, yang berpotensi mengganggu keseimbangan ekologis dan kualitas hidup warga. Namun, dalam beberapa kasus, kota global juga

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

berusaha meningkatkan RTH sebagai bagian dari strategi dalam membangun kota yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Di mana ruang hijau dipandang sebagai aset yang mendukung kesejahteraan masyarakat, daya tarik ekonomi, dan mitigasi perubahan iklim. Karena itu dampak perkembangan kota global terhadap RTH ini bervariasi tergantung pada kebijakan tata ruang dan komitmen pemerintah kota dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Hal ini pula yang sepertinya disadari oleh Pemerintah Pusat, melalui Kementerian PPN/Bappenas dalam merumuskan kebijakan umum kewilayahan Sumatra-Jawa dalam RPJPN 2025-2045 yang menempatkan Sumatra-Jawa-Bali sebagai *supercorridor* (Virgiyanti, 2024). Dimana tema pembangunan Pulau Jawa hingga 2045 diarahkan menjadi “Megalopolis yang unggul, inovatif, inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan”. Adapun dalam RPJMN 2025-2029 untuk Daerah Khusus Jakarta, Pemerintah ingin menjadikannya sebagai Kota Global Hijau yang menjadi simpul ekonomi Asia Tenggara.

Rumusan arah pembangunan “Kota Global Hijau” tersebut memperlihatkan kesadaran konseptual bahwa visi “kota global” yang menjadi mandat kekhususan Jakarta ke depan harus turut disertai dengan konsepsi “hijau” sebagai satu kesatuan cara pandang dalam menyeimbangkan arahkan pembangunan kota metropolitan ini ke depan. Elemen ini yang dapat dijadikan dasar pijakan sekaligus titik kritical dalam mendorong transformasi tata kelola RTH Jakarta.

Dari situasi empirik ini memperlihatkan gambaran area RTH Jakarta yang makin menurun tajam, membuat transformasi tata kelola RTH Jakarta merupakan langkah urgent yang harus dilakukan. Area RTH yang termuat dalam dokumen perencanaan sejak 1965-2022 jelas memperlihatkan tren penurunan tajam area RTH Jakarta sekitar 79.35%. Situasi mendesak yang membutuhkan respon segera dan sistematis.

Tabel 1. Area RTH dalam

Dokumen Perencanaan Tata Ruang Jakarta 1965-2022

Regulasi	Total Area RTH (ha)	% Area RTH
Master-plan Jakarta 1965-1985	24,315.04	37.20
Perda 5 tahun 1984 tentang RUTR DKI Jakarta 1985-2005	19,556.61	29.92
Perda No. 6 tahun 1999 tentang RTRW DKI Jakarta 1999-2010	9,111.60	13.94
Perda No. 1 tahun 2012 tentang RTRW 2030/Perda No.1 tahun 2014 tentang RDTR	7,520.96	11.51
Pergub No.31 tahun 2022 tentang RDTR WP Provinsi DKI Jakarta	5,025.78	7,56

(Sumber: diolah dari (Setiowati, Mizuno, Hasibuan, & Koestoer, 2022))

C.2. Transformasi Pengelolaan Ruang Hijau dalam Jakarta Baru

Upaya melakukan transformasi pengelolaan ruang hijau Jakarta dapat dilakukan melalui 2 langkah strategis:

1. Optimalisasi Ruang untuk RTH

Dengan visi menjadi Kota Global Hijau, harusnya dapat mengakselerasi kebijakan Pemerintah Kota Jakarta dalam berkreasi menciptakan ruang-ruang baru bagi pengembangan RTH. Lahan Kota Jakarta yang terbatas tidak lagi relevan menjadi alasan pragmatis untuk membiarkan kota ini tumbuh dikelilingi oleh hutan-hutan beton.

Sejatinya, Pemerintah Daerah memiliki kemampuan dalam memproduksi ruang baru ditengah ruang eksisting yang telah ada. Produksi ruang di perkotaan membutuhkan inovasi dan dukungan kebijakan dalam membangun interaksi yang mutualisme simbiosis antara lahan, infrastruktur, bangunan, dan kegiatan manusia (Han, Chan, Yung, Qian, & Lam, 2022; Lefebvre & Nicholson-Smith, 1974).

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Praktek baik yang dilakukan oleh Singapura, memberikan pesan yang jelas bagi Kota Global bahwa keterbatasan lahan tidak membuat upaya menghijaukan kota menjadi terhambat. Sebagai negara kota yang kecil dengan luas 728 km² dengan penduduk terpadat di dunia, dapat menjadikan Singapura sebagai rumah bagi keragaman flora dan fauna (Er, 2020). Penghijauan kota yang dilakukan sejak tahun 1960-an, menjadi contoh nyata bagaimana konsep pembangunan berkelanjutan telah menjadi pondasi kebijakan pemerintah Lee Kuan Yew di masa ketika itu kesadaran lingkungan masih rendah (Tan, Wang, & Sia, 2013). Visi "kota taman" (*garden city*) diperkenalkan oleh Perdana Menteri Lee Kuan Yew pada 11 Mei 1967 untuk mengubah Singapura menjadi kota yang hijau dan bersih, menjadikannya tempat yang nyaman bagi penduduk serta menarik bagi wisatawan dan investor asing (Song et al., 2022). Visi 'Garden City' menjadi pondasi pemerintah Singapura dalam mengintegrasikan elemen lingkungan, khususnya penyediaan RTH dalam pembangunan properti. Pada 1975, Undang-Undang Taman dan Pohon disahkan untuk memastikan pembangunan ruang hijau di proyek perumahan dan infrastruktur dilakukan secara terpadu. Sejak 1990-an, berbagai inisiatif turut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dari pelaksanaan visi "kota taman. *Singapore Green Plan/SGP2012* (diperkenalkan pada 1992, ditinjau ulang pada 1999 dan 2012) menjadi dokumen perencanaan yang dibuat dan ditinjau ulang perkembangannya (Song et al., 2022). Ditopang dengan penyusunan program inisiatif seperti '*Landscaping for Urban Spaces and High-Rises (LUSH)*', *NParks Skyrise Greenery Award*, serta *Green Roof Incentive Scheme*, telah mendorong perluasan ruang hijau dari 36 persen menjadi 47 persen (1986-2007) (Ho, 2020). Mengoptimalkan Skyrise greenery, dengan membangun taman di atap atau dinding bangunan, turut menambah luasan ruang hijau Singapura (Salim, 2019).

Kemudian kebijakan penghijauan Singapura diperbaharui pada tahun 1998 dengan memperkenalkan visi baru "kota dalam taman" ("*city in a garden*") sebagai lanjutan dari visi "kota taman". Visi baru ini bertujuan

untuk mengintegrasikan ruang hijau tidak hanya ke dalam lingkungan binaan, tetapi juga ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Singapura. Di tahun 2021, Pemerintah Singapura kembali memperkuat komitmen mengembangkan penghijauan kota dengan meluncurkan *Singapore Green Plan 2030* sebagai peta jalan dalam mengarahkan Singapura menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Rencana ini mencakup berbagai inisiatif dan target yang melibatkan seluruh sektor masyarakat, termasuk energi, transportasi, dan lingkungan hidup. Fokus utamanya adalah mengurangi emisi karbon, meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim, dan memperluas ruang hijau di seluruh kota. Dengan menetapkan langkah-langkah konkret hingga tahun 2030, rencana ini bertujuan untuk memastikan bahwa generasi mendatang dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik dalam lingkungan yang lebih sehat dan lebih ramah lingkungan.



Gambar 1.

Pilar Utama Singapore Green Plan 2030
(Sumber: <https://www.mof.gov.sg/singapore-public-sector-outcomes-review/citizens/quality-and-sustainable-living/environment-and-sustainability>)

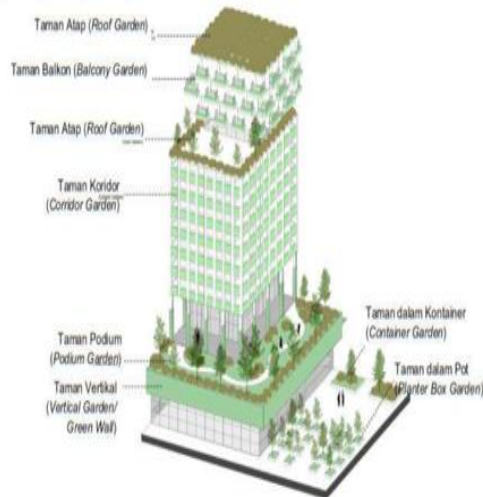
Pelajaran terpetik dari kebijakan Singapura menghijaukan kota, dapat menginspirasi Jakarta dalam mengoptimalkan ruang kota dalam mendukung masifikasi RTH. Ditopang kebijakan penataan RTH yang diatur dalam Permen ATR/BPN No. 14 tahun 2022, optimalisasi RTH dalam memanfaatkan ruang public dan private secara vertical dan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

horisontal. Bangunan Gedung, fasilitas public dan berbagai infrastruktur kota dapat menjadi media dalam menambah RTH, beutifikasi sekaligus menghijaukan kota.



Gambar 2.

Penataan RTH Bangunan Gedung berdasarkan Permen ATR 14/22

Sekurangnya terdapat 5 kluster fasilitas publik dan infrastruktur kota yang dapat di revitalisasi dan dikembangkan menjadi ruang baru bagi penambahan RTH. Kluster *pertama* RTH Layang atas dan bawah Tol Dalam Kota.



Gambar 3.

RTH Layang Atas Tol Dalam Kota

Infrastruktur jaringan tol dalam kota dapat dimanfaatkan untuk membangun RTH layang sebagai ruang baru penghijauan kota. Konstruksi bangunan layang di atas tol dalam Kota sepanjang kawasan cawang, pancoran,

kuningan, hingga Semanggi, dapat dimanfaatkan sebagai RTH sekaligus ruang publik untuk berbagai aktivitas.

Kluster *kedua* ialah RTH layang Jembatan Penyebrangan Umum. Revitalisasi JPU dengan menambahkan elemen hijau dan bahkan sarana sosial serta ekonomi dapat menjadi ruang fungsional baru dalam menambah area RTH. Kluster *ketiga* RTH Skybridge. Memanfaatkan ruang diatas Sungai yang melintas di dalam kota, dapat menjadi ruang tambahan bagi perluasan RTH.



Gambar 5.

RTH Skybridge

<https://finance.detik.com/infrastruktur/d-5575405/dibangun-5-tingkat-jembatan-penghubung-mrt-transjakarta-dibuka-saat-hut-dki/2>

Kluster *keempat* ialah RTH layang pedestrian. Dimana selain fungsi perluasan RTH, konstruksi bangunan di atas pedestrian ini dapat dimanfaatkan untuk menjadi sentra-sentra UMKM. Kluster *kelima* merevitalisasi sarana publik berupa perpustakaan daerah, gelanggang remaja untuk fungsi campuran. Selain menjadi sarana olahraga publik atau pusat literasi daerah, bangunannya dapat di tambahkan elemen RTH menggunakan konsep *vertical garden*. Tetap mengemban fungsi utamanya dengan revitalisasi kontruksis bangunan berkonsep taman vertikal.

Upaya optimalisasi RTH dengan menciptakan ruang-ruang baru dan revitalisasi bangunan, fasilitas dan infrastruktur publik dengan menambahkan *vertical garden* diharapkan dapat menjadi instrument perluasan RTH sekaligus menghijaukan kota. Dengan konsep RTH layang, dapat terbangun ruang-ruang baru untuk interaksi sosial, dan aktivitas fisik

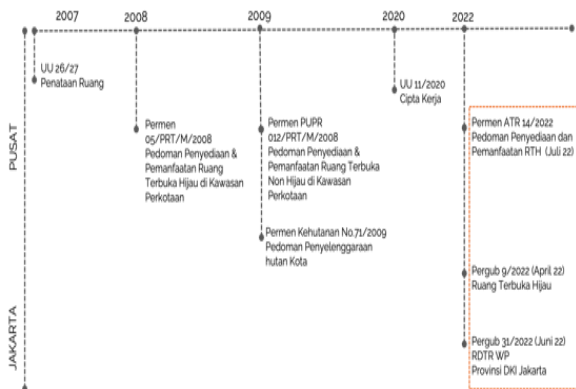
KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

yang dapat dimanfaatkan warga sekaligus tentunya memperluas area ruang hijau yang dimiliki Jakarta.

2. Membenahi Tata Kelola Ruang Hijau Jakarta



Gambar 8. Lini Masa Kebijakan RTH

Pemerintah Kota Jakarta telah merumuskan berbagai kebijakan dalam mendorong pengembangan RTH. Dalam kekhususan yang baru, perlu dilakukan penyesuaian kebijakan dan tata kelola ruang hijau dalam menopang visi Kota Global Hijau. Terdapat 3 (tiga) langkah yang dapat dilakukan dalam membenahi tata kelola ruang hijau ini: *pertama* Integrasi Perencanaan dan Pengarusutamaan Kebijakan RTH. Elemen ini menjadi langkah krusial dalam memperkuat tata kelola RTH yang efektif dan berkelanjutan dengan memastikan bahwa setiap rencana pembangunan di Jakarta memperhitungkan aspek keberlanjutan dan perlindungan lingkungan dan optimalisasi RTH. Demikian pula dalam perencanaan tata ruang kota, tidak sekedar memandatkan penambahan luas RTH tetapi mempertegas jaminan kualitas dan pemenuhan fungsi ekologis serta daya dukung dan daya tampung lingkungan kota. Pengarusutamaan kebijakan ini dapat dilakukan dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan sinergi antar sektor untuk menyelaraskan dan mengarusutamakan kebijakan optimalisasi RTH.

Elemen kedua, ialah penguatan tata kelola penyelenggaraan RTH Berbasis Kawasan. Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan RTH, perlu adanya pendekatan berbasis kawasan yang disesuaikan dengan

karakteristik wilayah, khususnya pada tingkat kecamatan. Penguatan tata kelola ini mencakup pengelolaan RTH yang berfokus pada kebutuhan dan potensi setiap wilayah, termasuk pemanfaatan ruang terbuka secara optimal dan berkelanjutan. Kebijakan berbasis kawasan juga melibatkan pengembangan jaringan ekologi yang menghubungkan berbagai RTH di seluruh Jakarta, sehingga membentuk koridor hijau yang berfungsi sebagai penyangga lingkungan dan penyedia jasa ekosistem. Dengan pengelolaan yang berbasis kawasan, setiap RTH dapat dimaksimalkan fungsinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lokal, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi.

Elemen *ketiga* ialah memperkuat pelibatan dan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Elemen ini merupakan pondasi penting dalam memperkuat tata kelola RTH di Jakarta. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi dapat menciptakan model pengelolaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Melalui pelibatan ini, setiap pemangku kepentingan memiliki peran aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan RTH. Inisiatif kolaboratif seperti *vertical garden*, RTH layang, pengembangan komunitas berbasis RTH, dan edukasi lingkungan dapat memperkuat kesadaran kolektif tentang pentingnya RTH serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas RTH di Jakarta. Dengan demikian, kolaborasi yang kuat dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas kebijakan RTH di masa mendatang.



Gambar 1.

Kerangka Penguatan Tata Kelola RTH Terpadu

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

D. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Transformasi Jakarta menjadi Kota Global Hijau memerlukan pendekatan yang holistik dan integratif, terutama dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Seiring dengan perubahan status Jakarta dan mandat baru yang diberikan melalui UU No. 2/2024, pemerintah daerah harus mengadopsi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pembangunan ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan ekologis. Tren penurunan luas RTH Jakarta yang mencapai 79.35% sejak 1965 hingga 2022 menegaskan perlunya langkah strategis yang segera dan sistematis untuk membenahi tata kelola RTH di Jakarta. Kebijakan yang mengintegrasikan pengarusutamaan keberlanjutan dalam setiap rencana pembangunan kota akan menjadi kunci dalam memastikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan.

Optimalisasi ruang untuk RTH juga menjadi langkah penting dalam mewujudkan visi Kota Global Hijau. Pemerintah Jakarta harus berinovasi dalam menciptakan ruang baru untuk RTH, seperti menerapkan konsep RTH layang di atas tol, jembatan penyebrangan umum, dan skybridge. Revitalisasi bangunan publik dengan menambahkan elemen taman vertikal juga bisa menjadi solusi untuk memperluas ruang hijau kota. Contoh dari Singapura menunjukkan bahwa keterbatasan lahan tidak harus menjadi hambatan dalam menghijaukan kota. Sebaliknya, dengan pendekatan yang kreatif dan didukung kebijakan yang tepat, Jakarta dapat meningkatkan luas dan kualitas RTH secara signifikan. Inisiatif ini tidak hanya akan memperbaiki lingkungan kota, tetapi juga akan mendukung kesejahteraan warga, meningkatkan daya tarik kota, dan membantu mitigasi perubahan iklim.

Dalam rangka mencapai keberlanjutan tata kelola RTH, pelibatan dan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan akademisi menjadi sangat penting. Setiap pemangku kepentingan harus dilibatkan secara aktif dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan RTH. Melalui kerja sama yang

kuat, kebijakan RTH dapat diimplementasikan dengan lebih efektif dan berkelanjutan. Inisiatif kolaboratif seperti vertical garden, RTH layang, dan program edukasi lingkungan dapat memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya RTH, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga dan mengembangkan RTH. Dengan pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, Jakarta dapat mewujudkan visinya sebagai Kota Global Hijau yang tidak hanya unggul secara ekonomi, tetapi juga harmonis dengan alam.

REFERENSI

- Anguelovski, I., Connolly, J., & Brand, A. L. (2018). From landscapes of utopia to the margins of the green urban life: For whom is the new green city? *City*, 22(3), 417–436. <https://doi.org/10.1080/13604813.2018.1473126>
- Bille, R. A., Jensen, K. E., & Buitenwerf, R. (2023). Global patterns in urban green space are strongly linked to human development and population density. *Urban Forestry and Urban Greening*, 86(May), 127980. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.127980>
- Chen, C., Deng, W., Ignatieva, M., Bi, L., Du, A., & Yang, L. (2023). Synergy of urban green space planning and ecosystem services provision: A longitudinal exploration of China's development. *Urban Forestry and Urban Greening*, 86(November 2022). <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.127997>
- Duff, C. A., & Dubery, J. H. (2023). Cross-disciplinary meaning and language for innovation in a business context: A conceptual paper. *African Journal of Science, Technology, Innovation and Development*, 15(5), 547–561. <https://doi.org/10.1080/20421338.2022.2154632>
- Er, K. (2020). *Transforming Singapore Transforming Singapore into a City in Nature*. Singapore. Retrieved from <https://www.clc.gov.sg/docs/default->

- source/urban-solutions/urbsol19pdf/09_essay_transforming-singapore-into-a-city-in-nature.pdf
- Essuman-Quainoo, B., & Jim, C. Y. (2023). Understanding the drivers of green roofs and green walls adoption in Global South cities: Analysis of Accra, Ghana. *Urban Forestry and Urban Greening*, 89(April), 128106. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2023.128106>
- Goel, S., Sherry, A., & Sherry, A. M. (2012). Role of Key Stakeholders in Successful E-Governance Programs: Conceptual Framework Role of Key Stakeholders in Successful E-Governance Programs: Conceptual Framework. In *AMCIS 2012 Proceedings*. AIS Electronic Library. Retrieved from <http://aisel.aisnet.org/amcis2012/proceedings/EGovernment/19%0AThis>
- Han, J., Chan, E. H. W., Yung, E. H. K., Qian, Q. K., & Lam, P. T. I. (2022). A Policy Framework for Producing Age-Friendly Communities from the Perspective of Production of Space. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(4), 2031. <https://doi.org/10.3390/ijerph19042031>
- Hanson, H. I., Eckberg, E., Widenberg, M., & Alkan Olsson, J. (2021). Gardens' contribution to people and urban green space. *Urban Forestry and Urban Greening*, 63(May), 127198. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127198>
- Ho, D. K. H. (2020). Greening the Urban Habitat: A Quantitative and Empirical Approach. *Greening The Urban Habitat: A Quantitative and Empirical Approach*, 1-196. <https://doi.org/10.1142/11472>
- Huang, J., Wang, X., Zhang, D., Zhang, Z., Yan, J., & Xia, F. (2023). Trade-offs under pressure? Development of urban green space under economic growth and governance. *Journal of Cleaner Production*, 427(May), 139261. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2023.139261>
- Hudalah, D. (2023). Building a capital city, carving out a megaproject legacy? *Habitat International*, 141(August), 102933. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102933>
- Jaakkola, E. (2020). Designing conceptual articles: four approaches. *AMS Review*, 10(1-2), 18-26. <https://doi.org/10.1007/s13162-020-00161-0>
- Johannessen, J. A., & Olsen, B. (2023). *How to Write Conceptual Papers in the Social Sciences: A Practical Guide for Students*. *How to Write Conceptual Papers in the Social Sciences: A Practical Guide for Students*. <https://doi.org/10.4324/9781003457091>
- Kalalinggi, R., Hisdar, M., Sarmiasih, M., & Wijaya, A. K. (2023). Forecasting The Development of IKN (New National Capital) in Sustainable Development, Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), PRESS. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.16786>
- Lefebvre, H. (Author), & Nicholson-Smith, D. (Translator). (1974). *The Production of Space*. Massachusetts: Blackwell Publishing.
- Li, J., Chaulagain, S., & Yost, E. (2023). Residents' sense of safety in senior living communities: A conceptual paper. *International Journal of Hospitality Management*, 112(December 2022), 103410. <https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2022.103410>
- Nassary, E. K., Msomba, B. H., Masele, W. E., Ndaki, P. M., & Kahangwa, C. A. (2022). Exploring urban green packages as part of Nature-based Solutions for climate change adaptation measures in rapidly growing cities of the Global South. *Journal of Environmental Management*, 310(February), 114786. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114786>
- Nero, B. F., Callo-Concha, D., Anning, A., &

- Denich, M. (2017). Urban Green Spaces Enhance Climate Change Mitigation in Cities of the Global South: The Case of Kumasi, Ghana. *Procedia Engineering*, 198(September 2016), 69–83. <https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.07.074>
- Pennisi, M. (2012). The Global City : Globalizing Local Institutions. *Journal of International Business and Law*, 11(1), 111–132.
- Rahman, N. A., Yaacob, Z., & Radzi, R. M. (2016). An Overview of Technological Innovation on SME Survival: A Conceptual Paper. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 224(August 2015), 508–515. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.05.427>
- Reese, S. D. (2023). Writing the Conceptual Article: A Practical Guide. *Digital Journalism*, 11(7), 1195–1210. <https://doi.org/10.1080/21670811.2021.2009353>
- Rifaid, R., Rachman, M. T., Baharuddin, T., & Gohwong, S. (2023). Public Trust: Indonesian Policy in Developing a New Capital City (IKN). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 263–273. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17681>
- Salim, A. Y. Q. (2019). *Opening The City , Completing The Region Transforming Urban life in Trans-National Tropical City of Batam*. Lund University.
- Sassen, S. (2008). The Global City. In D. Nugent & J. Vincent (Eds.), *A Companion to the Anthropology of Politics* (pp. 168–178). Oxford: Blackwell Publishing Ltd. <https://doi.org/10.1002/9780470693681.ch11>
- Scheuer, S., Davies, C., & Roitsch, D. (2024). Governance, institutional and economic frameworks for Urban Forests as a Nature-Based Solution in Europe. *Journal of Environmental Management*, 354(October 2023), 120384. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.120384>
- Schreiber, F., & Cramer, C. (2022). Towards a conceptual systematic review: proposing a methodological framework. *Educational Review*, 0(0), 1–22. <https://doi.org/10.1080/00131911.2022.2116561>
- Setiowati, R., Mizuno, K., Hasibuan, H. S., & Koestoer, R. H. (2022). Actor-network theory approach for urban green spaces planning: Study in Jakarta Capital City, Indonesia. *Kasetsart Journal of Social Sciences*, 43(4), 1075–1084. <https://doi.org/10.34044/j.kjss.2022.43.4.33>
- Song, S., Cheong, J. C., Lee, J. S. H., Tan, J. K. N., Chiam, Z., Arora, S., ... Tan, H. T. W. (2022). Home gardening in Singapore: A feasibility study on the utilization of the vertical space of retrofitted high-rise public housing apartment buildings to increase urban vegetable self-sufficiency. *Urban Forestry and Urban Greening*, 78(October), 127755. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2022.127755>
- Tan, P. Y., Wang, J., & Sia, A. (2013). Perspectives on five decades of the urban greening of Singapore. *Cities*, 32, 24–32. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.02.001>
- Torres, P. H. C., Souza, D. T. P. de, Momm, S., Travassos, L., Picarelli, S. B. N., Jacobi, P. R., & da Silva Moreno, R. (2023). Just cities and nature-based solutions in the Global South: A diagnostic approach to move beyond panaceas in Brazil. *Environmental Science and Policy*, 143(December 2022), 24–34. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2023.02.017>
- van der Jagt, A. P. N. N., Elands, B. H. M., Ambrose-Oji, B., GERÓHÁZI, É., Steen Møller, M., Ambrose-Oji, B., ... Buizer, M. (2016). Participatory Governance of Urban Green Spaces: Trends and Practices in the European Union. *Nordic Journal of Architectural Research*, 28(3), 11–34. Retrieved from internal-pdf://103.87.144.236/van de Jagt et

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

- al.pdf internal-
pdf://2219580627/VanderJagtetal2016.pdf
- Virgiyanti, T. D. (2024). *Pembukaan Kick Off Kegiatan Koordinasi Strategis Penajaman Arah Pengembangan Jakarta Pasca Pemindahan Ibukota Negara*. Jakarta. <https://doi.org/10.1119/1.2195399>
- Zhao, Y., Li, J., Collins, R. M., Deng, K., Wu, H., Yang, L., ... Wan, J. (2024). Bridging the gap: Public engagement in blue-green space development for healthier urban futures. *Journal of Environmental Management*, 360(May), 121173. <https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2024.121173>